

1. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penguatan pemenuhan akses pelayanan dasar di bidang air minum dan sanitasi, perbaikan kondisi bangunan gedung milik daerah, agar memenuhi standar fungsi dan keselamatan, peningkatan konektivitas wilayah, keselamatan transportasi, serta efektivitas penyediaan infrastruktur dasar menjadi kebutuhan strategis yang menuntut optimalisasi kapasitas teknis dan tata kelola pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain belum meratanya kondisi infrastruktur yang memenuhi standar, keterbatasan efektivitas pengelolaan sarana prasarana dasar, serta tantangan dalam memastikan keberfungsian aset daerah secara berkelanjutan, keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya optimal. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan perencanaan teknis, percepatan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur, serta optimalisasi dukungan terhadap penyediaan layanan dasar air minum dan sanitasi, peningkatan pendataan, penjaminan standar teknis, serta penguatan mekanisme pengawasan.

Tabel 3. 1

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2025 | | | RPD 2024-2026 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) | Target Akhir | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) |
| 1 | Indeks Reformasi Birokrasi (Perangkat Daerah) | Angka | 61 | 84,37 | 138,31 | 62 | 84,37 | 136,08 |
| 2 | Persentase jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor dan kondisi permukaan mantap | % | 68,01 | 71,38 | 104,95 | 70,29 | 71,38 | 101,55 |
| 3 | Indeks Pelayanan Keciptakarya | % | 39,39 | 38,6 | 97,99 | 43,25 | 38,6 | 89,25 |
| 4 | Indeks Manajemen Risiko | Angka | 3,11 | 2,96 | 95,18 | 3,12 | 2,96 | 94,87 |
| 5 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Angka | 92,25 | 94 | 101,90 | 95,9 | 94 | 98,02 |
| 6 | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor | % | 48,18 | 48,76 | 101,20 | 46,24 | 48,76 | 105,45 |
| 7 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap | % | 93,08 | 94,01 | 100,99 | 94,35 | 94,01 | 99,64 |
| 8 | Persentase kondisi jembatan provinsi baik | % | 82,15 | 85,43 | 103,99 | 92,33 | 85,43 | 92,53 |

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2025 | | | RPD 2024-2026 | | |
|----|---|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) | Target Akhir | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) |
| 9 | Persentase jumlah kompleks bangunan gedung milik daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar | % | 61,65 | 61,65 | 100 | 72,82 | 61,65 | 84,66 |
| 10 | Persentase akses air minum aman | % | 42,93 | 43,85 | 102,14 | 44,93 | 43,85 | 97,60 |
| 11 | Persentase akses air limbah domestik aman | % | 12,5 | 10,32 | 82,56 | 12 | 10,32 | 86 |

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya memiliki 11 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian 10 indikator sangat tinggi dan 1 indikator tinggi, terhadap target akhir RPD 3 indikator tercapai dan 8 indikator akan tercapai.

Adapun IKU yang belum mencapai target RKP, yaitu indikator:

- a. **Indeks Pelayanan Keciptakarya (97,99%)** dan **Persentase akses air limbah domestik aman (82,56%)** disebabkan oleh beberapa kendala mendasar, yakni pertumbuhan jumlah penduduk di kabupaten/ kota yang tidak diimbangi dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) baru karena keterbatasan anggaran kabupaten/ kota yang diprioritaskan untuk pembangunan tangki septik rumah tangga. Upaya yang dilakukan yaitu Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk mendukung kabupaten/ kota dengan mengalokasikan anggaran hibah guna mempercepat pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik.
- b. **Indeks Manajemen Risiko (95,18%)** disebabkan belum optimal dalam mewujudkan dampak nyata terhadap pembangunan infrastruktur. Upaya yang dilakukan melalui pelaksanaan tindak lanjut seluruh rekomendasi yang tercantum dalam laporan tersebut guna meningkatkan kematangan manajemen risiko dan kontribusinya terhadap pencapaian kinerja instansi.

A. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah turut melaksanakan 136 Program Prioritas Gubernur sebagai sebuah terobosan strategis yaitu peningkatan jalan kolektor dengan spesifikasi lebar 7 meter dan Muatan Sumbu Terberat (MST) 8 ton, implementasi program desalinasi di Kabupaten Demak, Brebes, dan Pati sebagai solusi jangka panjang bagi krisis air bersih di wilayah pesisir, serta peningkatan dan perluasan SPAM Regional Bregas dan Wosusokas untuk memperluas jangkauan akses air minum layak bagi masyarakat.

Dalam upaya menindaklanjuti rekomendasi DPRD Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan serangkaian program strategis yang terintegrasi antara sektor ketenagakerjaan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan infrastruktur jalan. Pada aspek ketenagakerjaan, program Padat Karya telah diwujudkan melalui Penyelenggaraan pemeliharaan rutin jalan dengan melibatkan Masyarakat Bina Marga (Masbima). Pada Tahun Anggaran 2025, program yang telah menjangkau seluruh Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) dengan melibatkan 824 orang. Di sektor penanggulangan kemiskinan, upaya konkret dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa. Pada TA 2025, program yang menyoar 30 desa prioritas dengan keterbatasan akses air bersih. Sementara itu, untuk meningkatkan keselamatan dan kualitas infrastruktur jalan, Pemerintah Provinsi secara khusus menangani ruas jalan rawan kecelakaan di Kalijambe-Purworejo. Rencana tindak lanjutnya telah dilaksanakan pembebasan tanah untuk pembangunan jalur penyelamat. Sedangkan, untuk memperkuat penanganan di seluruh wilayah, koordinasi intensif dengan Kementerian PUPR dan Dinas PU Kabupaten/Kota terus dilakukan, melalui aplikasi "Jalan Cantik" untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait jalan berlubang dan rawan kecelakaan.

a. Capaian Kinerja Program Sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Dalam melaksanakan urusan pekerjaan umum, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya didukung anggaran Rp1.062.553.158.000,00 untuk melaksanakan 5 program, yaitu:

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan** didukung anggaran Rp827.223.417.000,00 dengan realisasi fisik 99,99% dan keuangan 96,37%. Realisasi fisik tidak tercapai 100% dikarenakan paket pekerjaan peningkatan jalan Kuwu-Galeh di Kab.Grobogan terkendala proses pembebasan lahan milik Perhutani yang akan terbit rekomendasinya pada Tahun 2026. Program ini memiliki 25 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi. Terhadap target akhir RPD terdapat 10 indikator telah tercapai dan 15 indikator akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih terdapat ruas jalan provinsi yang belum memenuhi standar teknis yang berlaku. **Upaya** yang dilakukan antara lain: melakukan kegiatan peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan sesuai pemetaan prioritas penanganan. **Manfaat** program ini adalah meningkatkan kemantapan jalan sebagai sarana pendukung konektivitas antar wilayah dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian.
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** didukung anggaran Rp88.554.782.000,00 dengan **realisasi** fisik 100,00% dan keuangan 96,04%. Program ini memiliki 3 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase akses air minum layak, Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan Persentase akses air minum jaringan

perpipaan. Terhadap target akhir RPD terdapat 1 indikator telah tercapai yaitu Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota, dan 2 indikator akan tercapai yaitu Persentase akses air minum layak dan Persentase akses air minum jaringan perpipaan. **Permasalahan** yang dihadapi masih adanya kesenjangan akses air bersih antar daerah baik perkotaan maupun perdesaan. **Upaya** yang dilakukan yaitu perluasan cakupan layanan air bersih melalui pembangunan infrastruktur SPAM Regional dan SPAM Desa yang menysasar daerah rawan kekeringan. **Manfaat** program ini adalah tersedianya akses air bersih yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat yang bersumber dari sumber air berkelanjutan.

3. Program Penataan Bangunan Gedung didukung anggaran Rp45.795.822.000,00 dengan realisasi fisik 98,52% dan keuangan 91,31% dikarenakan penugasan khusus pembangunan revitalisasi PRPP menjadi pusat kegiatan MICE belum tercapai kesepakatan dengan investor sehingga belum dapat dilaksanakan, selain itu penugasan khusus rehabilitasi rumah dinas Gubernur yaitu Puri Gedeh tidak jadi dilaksanakan karena termasuk bangunan cagar budaya yang membutuhkan ijin khusus dari Dinas Kebudayaan Daerah dan Kajian Tim Ahli Cagar Budaya. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah dan Persentase kompleks bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut telah tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi masih terdapat Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) yang belum memenuhi standart teknis dan keselamatan. **Upaya** yang dilakukan yaitu melalui kegiatan pendataan dan bimbingan teknis tentang penyelenggaraan bangunan gedung negara yang berkelanjutan. **Manfaat** program ini adalah terwujudnya tata kelola bangunan gedung yang tertib dan memenuhi standar.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung anggaran Rp3.742.711.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98,39%. Program ini memiliki 2 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi yaitu Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi dan Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi. Terhadap target akhir RPD seluruh indikator tersebut akan tercapai. Permasalahan yang dihadapi yaitu ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat serta masih rendahnya kompetensi tenaga kerja konstruksi. Upaya yang dilakukan yaitu peningkatan jumlah, kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, dan bimbingan teknis. Manfaat program ini adalah meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi dalam rangka mewujudkan mendukung pembangunan infrastruktur yang masif, andal, berkualitas dan berkelanjutan.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

didukung anggaran Rp364.039.000,00 dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 93,95% dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Program ini memiliki indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi yaitu Persentase akses air limbah domestik layak. Terhadap target akhir RPD indikator tersebut akan tercapai. **Permasalahan** yang dihadapi belum optimalnya pengelolaan air limbah domestik yang berpotensi mencemari lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan masyarakat. **Upaya** yang dilakukan yaitu menyelenggarakan bimbingan teknis bagi Kelompok Pemanfaat dan Penyelenggara (KPP) Sanitasi untuk meningkatkan kapasitas dan manajerial operasional. **Manfaat** program ini adalah terwujudnya pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) komunal yang berkelanjutan dan mandiri melalui peningkatan kapasitas KPP Sanitasi yang profesional dan kompeten.

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK

| NO | PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KETERCAPIAN RPD (2024-2026) | | | TINGKAT KETERCAPIAN TAHUN 2025 | | |
|----------|---|--------|-------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | | |
| 1 | Persentase panjang jalan yang dileger | % | 100,00 | 58,32 | 58,32 | 58,32 | 58,32 | 100,00 |
| 2 | Persentase capaian penyusunan perencanaan jalan dan jembatan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Persentase pengawasan dan pengadaan lahan yang mendukung penyelenggaraan jalan | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur | % | 40,13 | 49,59 | 123,57 | 48,87 | 49,59 | 101,47 |
| 5 | Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan di Wilayah Barat | % | 45,80 | 47,85 | 104,48 | 47,43 | 47,85 | 100,89 |
| 6 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Tegal | % | 96,61 | 94,08 | 97,38 | 94,06 | 94,08 | 100,02 |
| 7 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Tegal | % | 86,24 | 79,42 | 92,09 | 78,42 | 79,42 | 101,28 |
| 8 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 95,86 | 94,81 | 98,90 | 95,33 | 94,81 | 99,45 |

| NO | PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KETERCAPAIAN RPD (2024-2026) | | | TINGKAT KETERCAPAIAN TAHUN 2025 | | |
|----|---|--------|--------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------|-----------|--------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pekalongan | % | 88,59 | 83,83 | 94,63 | 83,56 | 83,83 | 100,32 |
| 10 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Cilacap | % | 98,44 | 97,91 | 99,46 | 94,89 | 97,91 | 103,18 |
| 11 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Cilacap | % | 83,75 | 93,61 | 111,77 | 88,84 | 93,61 | 105,37 |
| 12 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Semarang | % | 96,21 | 94,78 | 98,51 | 94,78 | 94,78 | 100,00 |
| 13 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Semarang | % | 85,61 | 91,57 | 106,96 | 91,56 | 91,57 | 100,01 |
| 14 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Magelang | % | 95,64 | 96,04 | 100,42 | 93,98 | 96,04 | 102,19 |
| 15 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Magelang | % | 93,75 | 82,69 | 88,20 | 74,58 | 82,69 | 110,87 |
| 16 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 92,07 | 94,89 | 103,06 | 93,71 | 94,89 | 101,26 |
| 17 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Wonosobo | % | 95,00 | 93,71 | 98,64 | 84,18 | 93,71 | 111,32 |
| 18 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Pati | % | 92,04 | 94,03 | 102,16 | 91,03 | 94,03 | 103,30 |
| 19 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Pati | % | 93,92 | 88,35 | 94,07 | 78,13 | 88,35 | 113,08 |
| 20 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 80,76 | 91,26 | 113,00 | 90,71 | 91,26 | 100,61 |
| 21 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Purwodadi | % | 91,28 | 67,81 | 74,29 | 67,00 | 67,81 | 101,21 |
| 22 | Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan mantap di BPJ Wilayah Surakarta | % | 94,07 | 91,89 | 97,68 | 91,89 | 91,89 | 100,00 |

| NO | PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TINGKAT KETERCAPIAN RPD (2024-2026) | | | TINGKAT KETERCAPIAN TAHUN 2025 | | |
|--|---|--------|-------------------------------------|-----------|--------|--------------------------------|-----------|--------|
| | | | TARGET | REALISASI | % | TARGET | REALISASI | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 23 | Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik di BPJ Wilayah Surakarta | % | 94,88 | 91,91 | 96,87 | 91,87 | 91,91 | 100,04 |
| 24 | Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan | % | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| 25 | Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi | % | 100,00 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 100,00 |
| II PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | | | | | | | | |
| 1 | Persentase akses air minum layak | % | 95,45 | 94,86 | 99,38 | 93,94 | 94,86 | 100,98 |
| 2 | Persentase akses air minum jaringan perpipaan | % | 60,82 | 55,67 | 91,53 | 57,82 | 55,67 | 96,28 |
| 3 | Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| III PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG | | | | | | | | |
| 1 | Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah | % | 5,83 | 5,83 | 100,00 | 5,83 | 5,83 | 100,00 |
| 2 | Persentase komplek bangunan gedung milik daerah yang sudah dilakukan pendataan teknis | % | 11,17 | 12,23 | 109,49 | 12,23 | 12,23 | 100,00 |
| IV PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI | | | | | | | | |
| 1 | Persentase fasilitasi bidang jasa konstruksi | % | 72,79 | 66,67 | 91,59 | 66,67 | 66,67 | 100,00 |
| 2 | Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi | % | 51,09 | 48,01 | 93,97 | 48,01 | 48,01 | 100,00 |
| V PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | | | | | | | | |
| 1 | Persentase akses air limbah domestik layak | % | 96,78 | 92,42 | 95,49 | 95,18 | 92,42 | 97,10 |

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

- 1. Program Penyelenggaraan Jalan** didukung kegiatan **Penyelenggaraan Jalan Provinsi** dengan keluaran kegiatan yaitu: Peningkatan jalan sepanjang 77,3km, Rehabilitasi jalan sepanjang 76,41km Rehabilitasi jembatan sepanjang 67,9m, pemeliharaan rutin di sepanjang ruas jalan provinsi serta penyediaan lahan untuk penyelenggaraan jalan seluas 6.685m². Kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut rekomendasi DPRD terhadap aspek ketenagakerjaan program padat karya dan pembebasan tanah pada ruas jalan Kalijambe – Purworejo. **Outcome** meningkatnya kualitas jalan dan jembatan pada ruas jalan provinsi. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan keselamatan lalu lintas. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan efisiensi perjalanan, baik dari segi waktu dan biaya, disertai dengan peningkatan standar keselamatan bagi seluruh pengguna jalan dalam rangka mendukung aktivitas perekonomian. **Permasalahan** yang dihadapi pelaksanaan proyek peningkatan jalan menyebabkan penyempitan badan jalan, yang berimbas pada menurunnya kapasitas dan kelancaran ruas jalan tersebut. **Upaya** yang dilakukan menerapkan rekayasa lalu lintas guna meminimalisir dampak kemacetan.
- 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum** didukung kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota** dengan keluaran kegiatan yaitu: Pembangunan SPAM Desa di 30 desa (Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab.Purbalingga, Kab.Banyumas, Kab.Cilacap, Kab.Magelang, Kab.Purworejo, Kab.Kebumen, Kab.Pemalang, dan Kab.Brebes) dengan prioritas daerah yang memiliki keterbatasan akses air bersih, Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta dan Karanganyar) dan Pembangunan SPAM Regional Bregas (Brebes,Tegal dan Kota Tegal). Kegiatan ini juga merupakan tindaklanjut rekomendasi DPRD terhadap sektor penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan layanan dasar. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan akses, kapasitas, dan kualitas layanan air minum bagi masyarakat Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. **Dampak** kegiatan ini yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat melalui ketersediaan air yang dikelola secara aman. **Permasalahan** yang dihadapi pencarian sumber air baku yang memenuhi kriteria kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan guna menjamin operasional utamanya SPAM Desa. Upaya yang dilakukan sebagai langkah mitigasi, dilakukan koordinasi teknis dengan Dinas ESDM guna melaksanakan eksplorasi sumber air bawah tanah dengan survei geolistrik untuk menentukan lokasi pengeboran yang tepat.
- 3. Program Penataan Bangunan Gedung** didukung kegiatan **Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi** dengan keluaran kegiatan yaitu: Bantuan teknis dalam bentuk Bimtek pengelola BGMD di 60 lokasi kompleks BGMD, Pendataan teknis pada 126 lokasi kompleks BGMD, Pembangunan Sarana dan Prasarana Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) tahap 2 serta Pembangunan Masjid Setda

Provinsi Jawa Tengah dan Penataan Sarana dan Prasarana Lingkungan. **Outcome** kegiatan tersebut berupa teridentifikasi kualitas dan pengelolaan infrastruktur bangunan gedung pemerintah yang memadai, aman, dan berfungsi optimal untuk mendukung kepentingan strategis Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu tersedianya data base prioritas penanganan BGMD menuju standart. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya BGMD yang terpelihara dan laik fungsi. **Permasalahan** yang dihadapi utamanya pada kegiatan bantuan teknis yaitu tidak terpenuhinya kesesuaian antara profil peserta bimtek dengan materi dan tujuan bimtek. **Upaya** yang dilakukan yaitu seleksi peserta yang lebih ketat dan terstruktur, diawali dengan memperjelas serta mempertajam sasaran dan kriteria calon peserta serta diiringi dengan peningkatan koordinasi yang sinergis dan berkelanjutan dengan instansi pengirim untuk menyelaraskan persepsi.

4. Program Pengembangan Jasa Konstruksi didukung 4 kegiatan yaitu:

- 1) **Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi** dengan **keluaran** yaitu jumlah tenaga di bidang jasa konstruk si yang tersertifikasi sebanyak 1.100 orang dan jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti pelatihan sebanyak 1.900 orang. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu tersedianya tenaga ahli bersertifikat untuk menjamin keandalan dan kualitas infrastruktur. **Manfaat** kegiatan ini yaitu peningkatan daya saing dan profesionalisme tenaga kerja konstruksi. **Dampak** kegiatan ini yaitu peningkatan keselamatan, keandalan, dan umur layanan infrastruktur yang dibangun. **Permasalahan** yang dihadapi rendahnya kapasitas pemahaman sebagian peserta terhadap materi pelatihan. **Upaya** yang dilakukan pendekatan sistematis yang mencakup pelaksanaan *pre-assessment* guna memetakan level kemampuan peserta, penyesuaian kurikulum dengan tingkat kesulitan yang bertahap, penerapan metode pelatihan yang lebih partisipatif dan aplikatif.
- 2) **Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu jumlah penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) cakupan daerah provinsi sebanyak 5 kegiatan, yaitu peningkatan sistem informasi harga satuan pekerjaan konstruksi (MasPetruk), penyusunan buku Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi (HSPK), penyelenggaraan pameran, pengadaan buku konstruksi, dan pelatihan administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI). **Outcome** kegiatan tersebut berupa terkelolanya informasi jasa konstruksi secara digital dan termutakhir. **Manfaat** kegiatan ini yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan informasi jasa konstruksi daerah. **Dampak** kegiatan ini yaitu terciptanya ekosistem jasa konstruksi yang berteknologi dan berdaya saing. **Permasalahan** yang dihadapi kebutuhan integrasi antar sistem informasi pembina jasa konstruksi serta kebutuhan percepatan pemutakhiran sistem informasi yang

menyesuaikan perubahan kebijakan. Upaya yang dilakukan melalui peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan instansi terkait.

- 3) **Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi** dengan **keluaran** kegiatan yaitu laporan pengawasan bidang jasa konstruksi. **Outcome** kegiatan tersebut berupa peningkatan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan produk konstruksi di Provinsi Jawa Tengah. **Manfaat** kegiatan ini yaitu terwujudnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang sesuai dengan aturan. **Dampak** kegiatan ini yaitu terwujudnya tata kelola jasa konstruksi yang akuntabel dan transparan. **Permasalahan** yang dihadapi terkendalanya pengumpulan data pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia untuk melaksanakan pengawasan yang konsisten dan menyeluruh. **Upaya** yang dilakukan melaksanakan bimbingan teknis bagi aparatur pengawas dan objek pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah didukung kegiatan **Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional** dengan **keluaran** fasilitasi dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Batang, Pemalang dan Sragen. **Outcome** dari kegiatan ini yaitu peningkatan kualitas pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan. **Manfaat** kegiatan ini terjaganya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumber daya alam. **Dampak** kegiatan ini adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan, serta minimnya rasa kepemilikan terhadap fasilitas pengolahan limbah yang tersedia. **Upaya** yang dilakukan dengan memfasilitasi pemberdayaan masyarakat untuk mengelola air limbah domestik secara mandiri, dengan fokus pada peningkatan kapasitas, serta penguatan KPP Sanitasi.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang DPUBMCK dengan tingkat capaian keseluruhannya sangat tinggi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 3
Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUBMCK

| No | Uraian | Indikator Kinerja Program | | Indikator Kinerja Kegiatan | | Kesesuaian Kinerja | |
|----|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Jumlah | Rata-rata tingkat Ketercapaian (%) | Jumlah | Rata-rata tingkat Ketercapaian (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 3 | 99,08 | 3 | 99,08 | 100 | Sangat Tinggi |

| No | Uraian | Indikator Kinerja Program | | Indikator Kinerja Kegiatan | | Kesesuaian Kinerja | |
|----|--|---------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| | | Jumlah | Rata-rata tingkat Ketercapaian (%) | Jumlah | Rata-rata tingkat Ketercapaian (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1 | 97,1 | 1 | 97,1 | 100 | Sangat Tinggi |
| 3 | Program Penataan Bangunan Gedung | 2 | 100 | 2 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 4 | Program Penyelenggaraan Jalan | 25 | 100 | 26 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 5 | Program Pengembangan Jasa Konstruksi | 2 | 100 | 4 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |

Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Realinyemen Horisontal dan Jalur Penyelamat Darurat PJD Bener – Maron (Kalijambe)
2. Peningkatan Jalan Galeh – Ngrampal dan Jalan Kuwu – Galeh;
3. Penggantian Jembatan Dengkeng (Karangwuni - Bts. Prov. DIY)
4. Rehabilitasi Jalan Keling / Bts. Kab. Jepara – Tayu; Jalan Pati – Tayu dan Jalan Pati - Kayen - Sukolilo / Bts. Kab. Grobogan;
5. Pembangunan SPAM Regional Wosusokas; Bangunan Penunjang Desalinasi; SPAM Desa; Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R); Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Skala Kecamatan dan SPALDT IPAL+ 25SR;
6. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan melalui pemberdayaan Masyarakat Bina Marga (MASBIMA);
7. Pembangunan Gedung Instansi Vertikal; Gedung Parkir Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah; Gedung BKD Sronдол dan VIP Room di Lanud Adi Soemarmo.

11. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dihadapkan pada tantangan berupa peningkatan kualitas pelayanan sumber daya air, penguatan efektivitas pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu, penguatan kinerja sistem jaringan irigasi peningkatan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air menjadi kebutuhan prioritas untuk memastikan tercapainya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih adanya kesenjangan kualitas sarana dan prasarana sumber daya air, belum optimalnya efektivitas pengelolaan pemanfaatan ruang, keterbatasan dalam penegakan ketentuan rencana tata ruang, serta koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya terintegrasi. Upaya yang telah dilakukan antara lain melalui penguatan daya tampung embung dan penampungan air lainnya, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sumber daya air seperti embung, longstorage, jaringan irigasi, perkuatan tebing dan normalisasi sungai, penyiapan materi teknis perubahan peraturan daerah terkait rencana tata ruang wilayah serta koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, serta pemanfaatan dan pengendalian tata ruang daerah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3. 1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2025 | | | RPD 2024-2026 | | |
|----|--|--------|------------|-----------|--------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| | | | Target | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) | Target Akhir | Realisasi | Tingkat Ketercapaian (%) |
| 1 | Indeks Pelayanan Sumberdaya Air dan Penataan Ruang | Angka | 60,56 | 61,67 | 101,83 | 71,92 | 61,67 | 85,75 |
| 2 | Persentase tingkat kualitas pengelolaan sumberdaya air | % | 62,78 | 62,78 | 100 | 66,29 | 62,78 | 94,70 |
| 3 | Persentase keterwujudan penataan ruang | % | 58,33 | 58,33 | 100 | 77,56 | 58,33 | 75,21 |

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang memiliki 3 Indikator Kinerja Utama yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi, terhadap target target akhir RPD seluruhnya akan tercapai

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

3.1.1.1 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelayanan terhadap pemenuhan air baku di Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan kualitas air permukaan yang cenderung fluktuatif, disebabkan perubahan iklim global, terjadinya degradasi Daerah Tangkapan Air (DTA), adanya perubahan tata guna lahan dan limbah cair maupun padat yang berasal dari pemukiman atau industri yang berpotensi sebagai pencemar. Selain itu, kondisi fisik sungai cenderung menurun disebabkan tingginya laju sedimentasi akibat

erosi lahan budidaya sehingga kapasitas alir sungai menjadi berkurang dan belum sepenuhnya dapat menampung debit air di musim penghujan yang berpotensi menimbulkan genangan banjir.

Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) merupakan usaha dasar dalam memenuhi kebutuhan air baku irigasi untuk mendukung pertanian. Rehabilitasi jaringan irigasi dan penampung air baku serta operasi dan pemeliharaan prasarana merupakan bentuk nyata dalam mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas pembangunan daerah. Pembangunan bangunan perkuatan tebing merupakan wujud nyata dalam pembangunan infrastruktur dalam mendukung prioritas pembangunan daerah lainnya yaitu penanganan dampak perubahan iklim.

Intensitas pertumbuhan ekonomi dan aktivitas masyarakat cukup tinggi sehingga diperlukan rencana tata ruang wilayah yang efektif agar mobilitas masyarakat berjalan lancar. Penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan penyesuaian substansi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021. RTRW Provinsi Jawa Tengah merupakan perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota serta keserasian antar sektor yang memuat tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi dan menjadi acuan dalam rencana pembangunan Jawa Tengah selama dua puluh tahun kedepan.

a. Capaian Kinerja Program sesuai Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja.

Untuk melaksanakan urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah didukung anggaran Rp 291.087.720.000,00 untuk melaksanakan 2 program, yaitu:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung alokasi anggaran sebesar Rp 201.975.653.000,00 dengan realisasi fisik 94,83% dan keuangan 90,51% di karenakan masih ada pekerjaan yang diberikan toleransi perpanjangan waktu penyelesaian sampai dengan tahun 2026. Program ini memiliki 24 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi antara lain Indeks kinerja sistem irigasi, Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi, Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik.

Terhadap target akhir RPD terdapat 10 indikator telah tercapai dan 14 indikator akan tercapai. **Permasalahan** dari program tersebut dikarenakan dampak perubahan iklim dan tingginya laju sedimentasi menyebabkan semakin seringnya terjadi genangan banjir di beberapa daerah selain itu terdapat permasalahan lainnya yaitu terbatasnya ketersediaan air baku dan air permukaan. **Upaya** yang dilakukan sebagai langkah mitigasi potensi banjir yaitu perkuatan tanggul tebing sungai, melakukan normalisasi dan pengerukan sungai untuk mengurangi sedimentasi, membangun dan merehabilitasi infrastruktur pengendali banjir, serta memperkuat konservasi daerah hulu. Selain itu untuk

meningkatkan tampungan air melalui embung/waduk, mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan, dan memperbaiki pengelolaan air baku agar ketersediaan air tetap terjaga. serta pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur embung beserta jaringan irigasinya guna mengatasi keterbatasan ketersediaan air baku dan menurunnya kualitas air permukaan. **Manfaat** pelaksanaan program pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) yaitu guna memenuhi kebutuhan air baku untuk mencukupi kebutuhan pertanian serta meningkatnya fungsi sungai untuk menampung debit air di musim penghujan sehingga mengurangi potensi banjir dan rob.

2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang memiliki alokasi anggaran sebesar Rp3.169.196.000,00 dengan **realisasi** fisik 100% dan keuangan 92,89% disebabkan oleh adanya sisa lelang. Program ini memiliki 9 indikator kinerja yang mendukung RKPD dengan tingkat ketercapaian seluruhnya sangat tinggi antara lain Persentase implementasi pemanfaatan ruang; Persentase tertib ruang; dan Persentase ketersediaan rencana tata ruang.

Terhadap target akhir RPD terdapat 6 indikator telah tercapai dan 3 indikator akan tercapai. **Permasalahan** dari program tersebut yaitu meningkatnya perubahan tata guna lahan seiring dengan pertumbuhan aktivitas yang relatif tinggi. **Upaya** yang dilakukan yaitu fasilitasi terhadap penyusunan rencana tata ruang (RTR) Kabupaten/ Kota, pelaksanaan pemanfaatan ruang melalui penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) dan fasilitasi penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang. **Manfaat** pelaksanaan program yaitu meningkatnya efektivitas pemanfaatan ruang, mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang, menghindari bahaya lingkungan yang mungkin timbul akibat pemanfaatan yang salah dan mengendalikan pengembangan wilayah sesuai Rencana Pembangunan Daerah menuju pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan capaian kinerja program Dinas Pekerjaam Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Program Urusan Pekerjaam Umum dan Penataan Ruang (PUSDATARU)

| No | Program / Indikator Kinerja | Satuan | Tingkat Ketercapaian RPD (2024 - 2026) | | | Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025 | | |
|----------|---|--------|---|-----------|--------|--|-----------|----------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | | | | | | | |
| 1 | Persentase penyediaan rencana teknis terhadap rencana pembangunan infrastruktur sumberdaya air | % | 72,61 | 62,5 | 86,06 | 62,5 | 62,5 | 100 |
| 2 | Persentase embung dan penampung air lainnya kewenangan Provinsi Jawa Tengah dalam kondisi baik | % | 70,58 | 65,82 | 93,26 | 64,31 | 65,82 | 102,348 |
| 3 | Indeks kinerja sistem irigasi | Angka | 69,49 | 70,14 | 100,94 | 69,11 | 70,14 | 101,4904 |
| 4 | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi | % | 52,48 | 52,38 | 99,81 | 52,38 | 52,38 | 100 |
| 5 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | Angka | 62,76 | 64,35 | 102,53 | 64,35 | 64,35 | 100 |
| 6 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 34,81 | 34,78 | 99,91 | 34,78 | 34,78 | 100 |
| 7 | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Pemali Comal | % | 53,36 | 53,26 | 99,81 | 53,26 | 53,26 | 100 |
| 8 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | Angka | 71,86 | 71,8 | 99,92 | 71,8 | 71,8 | 100 |
| 10 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 72,73 | 63,64 | 87,5 | 63,64 | 63,64 | 100 |
| 11 | Persentase kondisi baik sungai kewenangan provinsi di wilayah BPSDA Bodri Kuto | % | 50,14 | 50,08 | 99,88 | 50,08 | 50,08 | 100 |

| No | Program / Indikator Kinerja | Satuan | Tingkat Ketercapaian RPD (2024 - 2026) | | | Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025 | | |
|----|--|--------|---|-----------|--------|--|-----------|-----|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 12 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | Angka | 63,35 | 64,39 | 101,64 | 64,39 | 64,39 | 100 |
| 14 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 64,71 | 50 | 77,27 | 50 | 50 | 100 |
| 15 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | Angka | 67,43 | 67,36 | 99,8 | 67,36 | 67,36 | 100 |
| 17 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 77,82 | 67,35 | 86,55 | 67,35 | 67,35 | 100 |
| 18 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | Angka | 77,4 | 78,45 | 101,36 | 78,45 | 78,45 | 100 |
| 20 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 92,25 | 92,23 | 99,98 | 92,23 | 92,23 | 100 |

| No | Program / Indikator Kinerja | Satuan | Tingkat Ketercapaian RPD (2024 - 2026) | | | Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025 | | |
|----|--|--------|---|-----------|-------|--|-----------|-----|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 21 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | Indeks kinerja sistem irigasi di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | Angka | 74,11 | 72,65 | 98,03 | 72,65 | 72,65 | 100 |
| 23 | Persentase kondisi baik embung dan penampung air lainnya di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 81,15 | 76,5 | 94,27 | 76,5 | 76,50 | 100 |
| 24 | Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan pendayagunaan di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

II PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

| | | | | | | | | |
|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 1 | Persentase implementasi pemanfaatan ruang | % | 88 | 76 | 86,36 | 76 | 76 | 100 |
| 2 | Persentase tertib ruang | % | 67 | 48 | 71,64 | 48 | 48 | 100 |
| 3 | Persentase ketersediaan rencana tata ruang | % | 77,67 | 50,88 | 63,10 | 50,99 | 50,99 | 100 |
| 4 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| No | Program / Indikator Kinerja | Satuan | Tingkat Ketercapaian RPD (2024 - 2026) | | | Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 2025 | | |
|----|---|--------|---|-----------|-----|--|-----------|-----|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % |
| 7 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase pelaksanaan pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

b. Capaian Target Kinerja Keluaran Kegiatan

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) didukung 2 (dua) kegiatan yaitu:

- 1) Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota** beberapa keluaran diantaranya 10 paket rehabilitasi dan pembangunan prasarana dan sarana air baku seperti rehabilitasi di Embung Triharjo Kabupaten Kendal dan pembangunan di Embung Kemurang Wetan Kabupaten Brebes; Pembangunan bangunan perkuatan tebing pada Sungai Bremi Meduri Kab/Kota Pekalongan; dan pengadaan pompa untuk mendukung penanganan darurat akibat banjir rob sebanyak 6 unit yaitu 3 unit trailer pump dengan kapasitas 1x250 lps, 2 unit mobile pump truck dengan kapasitas 1x250 lps dan 2x250 lps, serta 1 unit pompa air tenaga surya (PATS) dengan kapasitas 2x126 lps di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. **Outcome** kegiatan tersebut memaksimalkan kapasitas penampungan air baku, mengantisipasi terjadinya abrasi, erosi dan mencegah terjadinya genangan banjir maupun rob. **Manfaat** kegiatan tersebut yaitu memenuhi kebutuhan air baku untuk pertanian, air bersih untuk masyarakat dan mitigasi terjadinya bencana banjir rob. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu meningkatnya produktifitas pertanian, meningkatnya akses air bersih dan mengurangi kerugian sosial ekonomi akibat banjir rob. **Permasalahan** yang dihadapi dalam kegiatan tersebut adalah tingginya intensitas hujan pada saat pelaksanaan konstruksi, keterbatasan infrastruktur dan sarpras dalam penanganan banjir. **Upaya** yang dilakukan yaitu penyesuaian jadwal pekerjaan dengan pertimbangan musim, penyediaan

sarpras tambahan, serta pembangunan dan pemeliharaan bangunan perkuatan tanggul, tebing sungai, normalisasi sungai, dan embung.

- 2) **Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota** dengan **keluaran** antara lain terdapat 14 paket pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi seperti di DI Klego Kabupaten Boyolali dan DI Banjaran Kabupaten Banyumas. Selain itu, terdapat keluaran pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan pada 108 DI yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan seperti pada DI Tangsi di Kabupaten Magelang dan DI Sudikampir Kabupaten Pekalongan. Kegiatan tersebut termasuk tindak lanjut dari Rekomendasi DPRD terhadap penguatan program padat karya dengan program infrastruktur berbasis masyarakat dan program tenaga kerja mandiri. **Outcome** kegiatan tersebut yaitu optimalnya infrastruktur jaringan irigasi. **Manfaat** dari kegiatan tersebut yaitu mendukung pengairan pada lahan pertanian masyarakat. **Dampak** kegiatan tersebut yaitu mewujudkan ketahanan pangan. **Permasalahan** yang dihadapi adalah tingginya curah hujan yang mempengaruhi pada saat pelaksanaan konstruksi. **Upaya** yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut memberikan toleransi waktu perpanjangan penyelesaian pelaksanaan pekerjaan.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang didukung 4 (empat) kegiatan yaitu:

- 1) **Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi** dengan **keluaran** pelaksanaan Sosialisasi Perda No. 8 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 kepada 35 OPD Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memiliki kewenangan dalam bidang perindustrian, perijinan, lingkungan hidup dan kebencanaan; dokumen kajian arah pengembangan pada wilayah Rembang - Blora (WP BANGLOR) dan kajian arah pengembangan pada wilayah Wonosobo - Banjarnegara (WP WONOANJAR). **Outcome** dari kegiatan tersebut yaitu memberikan informasi untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terkait penataan ruang pada level provinsi sebagai bahan OPD Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan penataan ruang Kabupaten/Kota. Outcome kegiatan lainnya yaitu tersedianya pedoman penataan ruang WP BANGLOR dan WONOANJAR. **Manfaat** kegiatan yaitu sinkronisasi dan integrasi rencana pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan Kab/Kota. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya tertib penyelenggaraan tata ruang. **Permasalahan** yang dihadapi yaitu kompleksitas kajian tata ruang yang membutuhkan waktu lebih untuk koordinasi dan sosialisasi. **Upaya** yang telah dilakukan yaitu sosialisasi dan koordinasi berkelanjutan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota.
- 2) **Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang** dengan **keluaran** Kajian Tematik Sektoral dan Pembinaan atau fasilitasi Rencana Tata Ruang di 15 Kabupaten/Kota. **Outcome** kegiatan yaitu teridentifikasinya permasalahan tata ruang di Kab/Kota dan tingkat kerentanan risiko bencana serta tersusunnya RDTR dan RTRW Kab/Kota. **Manfaat** kegiatan yaitu terwujudnya produk rencana Tata ruang yang berkualitas, operasional dan implementatif serta terintegrasinya rencana tata ruang, rencana pembangunan

dan mitigasi bencana. **Dampak** kegiatan yaitu terkendalinya pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota dan terjaganya nilai-nilai strategis Provinsi pada masing-masing Kabupaten/Kota serta terwujudnya Jawa Tengah yang tangguh terhadap bencana. **Permasalahan** kegiatan yaitu proses penyusunan sampai dengan penetapan RDTR dan RTRW yang memiliki tahapan cukup panjang karena dibutuhkan penyesuaian antar sektor agar saling terintegrasi **Upaya** yang dilakukan yaitu koordinasi berkelanjutan untuk penyelesaiannya.

3) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dengan **keluaran** 6 dokumen implementasi pemanfaatan ruang yang terdiri atas 4 dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan 2 dokumen sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yaitu pengembangan *database* penataan ruang dan pelaksanaan pembinaan data geospasial. **Outcome** kegiatan yaitu teridentifikasinya isu-isu penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah, **Manfaat** kegiatan yaitu selarasnya program dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan program rencana pembangunan. **Dampak** kegiatan yaitu terwujudnya kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** kegiatan yaitu banyaknya dinamika kebijakan baru khususnya terkait pemanfaatan ruang yang mempengaruhi proses pemenuhan persyaratan dasar perizinan, adanya permasalahan dan isu strategis terkait pemanfaatan ruang di Kabupaten/Kota, belum selarasnya program dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dengan program dalam rencana pembangunan, serta banyaknya kebutuhan data dan informasi dalam bentuk spasial. **Upaya** kegiatan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pusat, sosialisasi terkait penataan ruang kepada Masyarakat, pembinaan kepada Kabupaten/Kota dengan melibatkan pusat dan/atau narasumber terkait, melaksanakan rapat koordinasi baik berupa rapat rutin triwulan maupun rapat insidental Forum Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah guna membahas isu dan permasalahan penataan ruang yang muncul, menyusun dokumen SPPR Jangka Menengah (5 tahunan) dan SPPR Jangka Pendek (1 tahunan) guna menyelaraskan indikasi program utama dalam RTR dengan program dalam rencana pembangunan, menyusun pengembangan *database* penataan ruang serta melaksanakan pembinaan dalam pembuatan data geospasial kepada semua produsen data di Provinsi Jawa Tengah agar masing-masing produsen data dapat membuat data instansinya dalam bentuk geospasial.

4) Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi dengan **keluaran** 4 dokumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang di 35 Kab/Kota dan 2 dokumen pengawasan penataan ruang Kab/Kota. **Outcome** kegiatan yaitu teridentifikasinya potensi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang. **Manfaat** kegiatan yaitu meningkatkannya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang. **Dampak** kegiatan yaitu mewujudkan tertib ruang di Provinsi Jawa Tengah. **Permasalahan** kegiatan yaitu adalah dinamisnya kebijakan baru yang mempengaruhi pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Provinsi. Upaya kegiatan yaitu pembinaan, kolaborasi antar sektor di Kab/ Kota, provinsi dan pusat, penyusunan database pengendalian pemanfaatan ruang serta peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur pemerintahan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

c. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program pada Perjanjian Kinerja

Hasil perhitungan tingkat kesesuaian antara kinerja program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No | Uraian | Indikator Kinerja Program | | Indikator Kinerja Kegiatan | | Kesesuaian Kinerja (Program dan Kegiatan) | |
|----|---|----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|
| | | Jumlah Indikator Kinerja Program | Rata-rata tingkat Ketercapaian Indikator Program (%) | Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan | Rata-rata Tingkat Ketercapaian Indikator Kegiatan (%) | Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan (%) | Predikat Tingkat Kesesuaian Kinerja Program dan Kegiatan |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) | 24 | 100 | 32 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |
| 2 | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 9 | 100 | 11 | 100 | 100 | Sangat Tinggi |

Tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan tingkat capaian sangat tinggi yang artinya bahwa kegiatan yang dilakukan tepat dalam mendukung kinerja program. Rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan tahun 2026 yaitu:

1. Pembangunan tanggul sungai di Kabupaten Demak
2. Pembangunan bangunan pantai pada di Kabupaten Demak
3. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan primer dan sekunder diantaranya di Kabupaten Demak dan Kabupaten Pati.